



## Penerapan Collaborative Governance dalam Pengentasan Kumuh dan Isu Pengembangan Potensi Lokal Kawasan Pesisir Kabupaten Tangerang

### *Implementation of Collaborative Governance in Slack Eradication and Local Potential Development Issues in Tangerang Coastal Region*

Indra Pratama Putra Salmon\*<sup>1</sup>; Ismail<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Departemen Magister Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIP, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bhayangkara, Surabaya, Indonesia

#### ARTIKEL INFO

\* Corresponding author;  
[indra.pratama.p@mail.ugm.ac.id](mailto:indra.pratama.p@mail.ugm.ac.id)

#### Kata Kunci:

collaborative governance;  
kemiskinan;  
pesisir;

collaborative governance;  
poverty;  
coastal;

#### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji strategi collaborative governance dalam mengatasi paradoks berupa tingginya potensi sumber daya alam (SDA). Sangat menarik ketika terjadi paradoks banyaknya kelebihan dan peluang kesejahteraan namun pada kenyataannya belum mampu terselesaikan dan terjadi keterpurukan. Dengan dilatarbelakangi oleh fenomena kumuh permukiman, minimnya prasarana sarana utilitas (PSU), serta kemiskinan di Pesisir Kabupaten Tangerang, penelitian ini berupaya menjelaskan peran stakeholder dalam upaya mengatasi masalah tersebut. Objek penelitian yakni di 4 (empat) kawasan pesisir di Kabupaten Tangerang yakni Desa Dadap, Desa Tanjung Pasir, Desa Kohod, dan Desa Surya Bahari. Metode penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teknik analisis dilakukan dengan teknik participation rural appraisal (PRA) yang dilanjutkan pemetaan SWOT dan penyusunan strategi pembangunan kawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kawasan memiliki isu strategis dan potensi lokal yang berbeda. Skema kerjasama antar stakeholder sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab berpotensi menjadikan 4 (empat) desa di Kabupaten Tangerang berpotensi mengalami kemajuan perkembangan, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Upaya awal yakni dengan melaksanakan skema berbagi peran antar stakeholder dalam pengentasan kumuh serta meningkatkan standar kualitas permukiman beserta PSU sesuai dengan ketentuan regulasi kebijakan. Upaya selanjutnya yakni dengan penguatan kemampuan warga beserta aspek pendukung dalam mengoptimalkan potensi lokal seperti hasil perikanan/kelautan (tangkap/budidaya), agro, pertanian, dan wisata berbasis pesisir.

This study examines collaborative governance strategies in overcoming paradoxes in the form of high natural resource potential (SDA). It is very interesting when there are paradoxes where there are many advantages and opportunities for prosperity, but in reality they have not been able to be resolved and there is a deterioration. With the background of the phenomenon of slum settlements, the lack of utility infrastructure (PSU), and poverty in the Coastal District of Tangerang, this study seeks to explain the role of stakeholders in efforts to overcome these problems. The object of research is in 4 (four) coastal areas in Tangerang Regency, namely Dadap Village, Tanjung Pasir Village, Kohod Village, and Surya Bahari Village. The research method was conducted by interview, observation, and study of documents. The analysis technique was carried out using the participation rural appraisal (PRA) technique followed by SWOT mapping and the preparation of regional development strategies. The initial effort is to implement a role sharing scheme between stakeholders in the alleviation of slums and to improve the quality standards of settlements and PSU in accordance with the provisions of policy regulations. The next effort is by strengthening the ability of citizens along with supporting aspects in optimizing local potential such as fisheries / marine products (capture / cultivation), agro, agriculture, and coastal-based tourism.

## PENDAHULUAN

Sebagai kawasan penyangga ibukota, kawasan pesisir di Kabupaten Tangerang belum secara menyeluruh tersentuh dampak pembangunan dari Kota Jakarta. Hal tersebut terjadi pada penduduk pinggiran dan perbatasan ibukota khususnya di 4 (empat) desa yang merupakan jalur sekitar ibukota serta berbatasan langsung dengan Laut Jawa yakni Desa Kampung Baru Dadap, Desa Tanjung Pasir, Desa Kohod, dan Desa Surya Bahari. Masyarakat lokal yang seharusnya dapat menikmati kelayakan sosial ekonomi seperti tercukupinya layanan fasilitas umum, fasilitas sosial dasar, serta persebaran secara material dari perekonomian ibukota sebagai dampak pembangunan serta keberadaan titik-titik strategis pembangunan, justru mengalami berbagai keterbatasan dari aspek layanan dan dampak pembangunan tersebut. Kondisi ini sejalan dengan apa yang menurut Hill dan Weidemann (1991) dalam Keban (1998) yakni kondisi yang “terabaikan” bagi masyarakat di Kabupaten Tangerang.

Pada kenyataannya, kondisi “terabaikan” juga dialami oleh masyarakat lokal pesisir di Kabupaten Tangerang yang secara langsung berbatasan dengan ibukota. Kondisi sosial ekonomi masyarakat kawasan pesisir di Kabupaten Tangerang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan rata-rata masyarakat ibukota. Ketertinggalan tersebut dilihat dari 2 (dua) hal yakni: pertama, kawasan pesisir di Kabupaten Tangerang masuk dalam kategori kawasan permukiman kumuh, dan; kedua, terdapat paradoks berupa tingginya potensi sumber daya alam (SDA) yang tidak sebanding dengan kesejahteraan mayoritas penduduk lokal. Dalam Surat Keputusan Bupati Tangerang No:050/Kep.47-Huk/2015 tentang Penetapan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tangerang, 4 (empat) desa pesisir tersebut masuk dalam kawasan kumuh dengan kategorisasi mulai dari kumuh ringan hingga kumuh berat.

**Tabel 1. Rincian Kumuh Kawasan Perencanaan di Kabupaten Tangerang**

No	Desa/ Kecamatan	Kategori Kumuh					
		Kumuh Ringan		Kumuh Sedang		Kumuh Berat	
		Luasan (Ha)	Unit Rumah	Luasan (Ha)	Unit Rumah	Luasan (Ha)	Unit Rumah
a	Tanjung Pasir, Teluk Naga	1,85 Ha	254 unit	1,21 Ha	166 unit	-	-
b	Surya Bahari, Pakuhaji	2,51 Ha	345 unit	-	-	-	-
c	Kohod, Pakuhaji	0,98 Ha	135 unit	1,81 Ha	249 unit	-	-
d	Dadap, Kosambi	-	-	-	-	9,88 Ha	1.354 unit

Sumber. SK Bupati Tangerang No:050/Kep.47-Huk/2015 (diakses pada 2019)

Tingginya jumlah areal permukiman kumuh menjadikan kondisi masyarakat pesisir semakin sulit mencapai kesejahteraan kehidupan mengingat adanya persiapan kebutuhan materi (khususnya finansial) guna perbaikan dan peningkatan kualitas permukiman ketika dilakukan secara pribadi. Dari sekian banyaknya permukiman kumuh di Kabupaten Tangerang, telah dicantumkan dalam SK Bupati Tangerang No:050/Kep.47-Huk/2015 bahwa terdapat sekitar 254 unit rumah kategori kumuh ringan dengan total luasan 1,85ha dan 166 unit rumah kategori kumuh sedang dengan total luasan 1,21ha di Desa Tanjung Pasir; 345 unit rumah kategori kumuh ringan dengan total luasan 2,51ha di Desa Surya Bahari; 135 unit rumah kategori kumuh ringan dengan luasan 0,98ha dan 249 rumah kategori kumuh sedang dengan total luasan 1,81ha di Desa Kohod, serta; 1.354 unit rumah kategori kumuh sedang dengan total luasan 9,88ha di Desa Dadap. Selain tingginya jumlah areal permukiman kumuh, minimnya kebutuhan dasar lain seperti kurangnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, prasarana air bersih, MCK, tempat pembuangan akhir (TPA), serta buruknya sanitasi lingkungan semakin menjadikan kualitas hidup masyarakat terpuruk dan berada di bawah standar kualitas hidup masyarakat ibukota. Kondisi permukiman dan PSU tersebut yang kemudian berdampak juga pada kondisi sosial masyarakat lokal pesisir.

Permasalahan lain adalah potensi pesisir yang belum tereksplorasi dan dikembangkan secara menyeluruh sehingga terjadi stagnasi kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat lokal. Gejala stagnasi tersebut dapat dilihat dari

pendapatan di masing-masing wilayah. Mayoritas pekerja lokal seperti petani dan nelayan pesisir hanya memiliki pendapatan yang berkisar di angka Rp.600.000,00 hingga Rp.2.200.000,00 perbulan, serta pendapatan perhari berada pada kisaran angka Rp.50.000,00 hingga Rp.100.000,00 (Bappeda Kabupaten Tangerang, 2018). Sementara itu pada tahun 2018, angka tersebut jauh dari standar upah minimum kabupaten (UMK) di Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2018 disebutkan bahwa UMK Kabupaten Tangerang telah mencapai Rp.3.622.215,00 perbulan (SK Gubernur Banten No.561/Kep.442-Huk/2017, diakses pada 2018). Dengan adanya perbandingan antara pendapatan riil penduduk lokal dengan standar pendapatan daerah, maka dinyatakan bahwa kesejahteraan ekonomi penduduk lokal masih jauh dari harapan dan kelayakan ekonomi di Kabupaten Tangerang.

Selain permasalahan kesejahteraan, rendahnya tingkat sumber daya manusia (SDM) di setiap kawasan juga menjadi pemicu mengapa pengembangan potensi kawasan terhambat. Ketersediaan fasilitas sosial dasar seperti akses pendidikan masih terbatas. Di samping itu, sebagian besar masyarakat di Pesisir Kabupaten Tangerang hanya mengenyam pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Data demografi yang bersumber dari Data Bappeda Kabupaten Tangerang 2016 (diakses pada 2019) mencatat bahwa di Desa Dadap terdapat 1.175 penduduk dari 1.416 penduduk dengan tingkat pendidikan tidak sekolah hingga pendidikan menengah (SMP); Desa Tanjung Pasir dari 10.144 penduduk, terdapat 8.077 penduduk yang merupakan penduduk tidak sekolah hingga lulusan SMP; Desa Surya Bahari dari 7.350 penduduk, terdapat kurang dari 100 penduduk yang mengenyam pendidikan atas, sisanya adalah penduduk yang tidak bersekolah hingga tamatan SMP, dan; Desa Kohod, lebih dari separuh dari seluruh jumlah penduduknya tidak bersekolah. Fenomena ini mencerminkan bahwa SDM masyarakat pesisir di Kabupaten Tangerang masih sangat terbatas dan terancam kesulitan dalam mengelola potensi baik SDA maupun SDM tanpa ada dukungan berupa trigger (pemicu) pengembangan masyarakat.

Fenomena permukiman kumuh dan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat lokal

menunjukkan skema sebab akibat dan saling berdampak satu sama lain. Hal tersebut sekaligus menarik satu fakta bahwa kemiskinan merupakan satu konsepsi yang bersifat multidimensional. Paradigma yang digunakan dalam menuntaskan pun juga seyogyanya dilakukan secara komprehensif, bukan secara parsial dengan membedakan aspek-aspek tertentu. Tjokrowinoto (1995) dalam Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa menuntaskan kemiskinan masyarakat bukan hanya menuntaskan persoalan kesejahteraan (welfare) yang hanya mendasarkan pada pendapatan saja, namun di luar itu masih terdapat beberapa aspek menyangkut kerentanan (vulnerability), ketidakberdayaan (powerless), akses peluang kerja dan usaha yang terbatas, kebutuhan konsumsi yang tidak sebanding dengan pendapatan, angka rasio ketergantungan (dependency ratio) yang tinggi, keterbatasan akses terhadap pasar, serta kemiskinan turun temurun. Fakta yang disampaikan Tjokrowinoto (1995) dalam Sulistiyani (2004) tercermin dalam kondisi sehari-hari masyarakat lokal di Pesisir Kabupaten Tangerang bahwa kondisi permukiman yang kumuh dan rendahnya pendapatan merupakan gejala dari adanya beragam kondisi mulai dari kerentanan lingkungan akan bencana alam, peluang kerja dan usaha yang terbatas di sekitar kawasan pesisir, kebutuhan hidup yang tinggi namun tidak berimbang dengan pendapatan yang diperoleh, rasio ketergantungan yang cukup tinggi, tingginya angka kerja di sektor pekerja kelas menengah ke bawah akibat rendahnya tingkat pendidikan dan keengganan untuk mengoptimalkan potensi kawasan bagi penduduk lokal dengan SDM yang mumpuni, serta powerless yang tercermin dari ketidakmampuan masyarakat dalam pengelolaan potensi kawasan sehingga belum mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi kebutuhan sehari-hari dan keberlanjutan hidup. Bagi penduduk lokal di Pesisir Kabupaten Tangerang, kumuh dan kemiskinan seakan telah menjadi semacam lingkaran setan (vicious circle) yang terjadi bertahun-tahun dan turun temurun.

## **I. Pendekatan Penelitian**

### **II.A. Paradigma Kapabilitas dalam Pembangunan Sosial Ekonomi**

Berangkat dari apa yang dinyatakan oleh Sen (1999) bahwa “kapabilitas untuk berfungsi (capability to function)” menjadi salah satu faktor utama yang menentukan status miskin tidaknya seseorang. Di samping itu, Sen (1999) juga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipandang sebagai tujuan pembangunan, lebih dari itu bahwa pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang dijalankan dan kebebasan yang dapat dinikmati. Pembangunan dalam hal ini memberikan penekanan bahwa pembangunan tidak selayaknya hanya berorientasi pada materi, namun lebih pada bagaimana menjadikan sasaran pembangunan lebih berdaya, mandiri, dan memiliki prinsip keberlanjutan kehidupan.

Kemiskinan seringkali menjadi bermakna negatif dikaitkan dengan kondisi ketahanan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Kemiskinan erat kaitannya dengan kerentanan sosial ekonomi masyarakat. Namun pada dasarnya Sen (1999) dalam Todaro dan Smith (2011) menyampaikan bahwa kemiskinan tidak dapat diindikasikan hanya dengan pendapatan atau bahkan dengan utilitas seperti pemahaman yang selama ini terjadi. Lebih lanjut lagi bahwa yang menjadi titik penekanan adalah bagaimana kemudian masyarakat miskin memiliki peran dan melakukan hak-haknya. Hal yang terpenting yang disampaikan oleh Sen (2009) yakni kesejahteraan bukan semata-mata tentang komoditas yang dikonsumsi, namun manfaat apa yang dapat diperoleh dari hasil konsumsi tersebut.

Dalam memahami konsep kesejahteraan dan kemiskinan, harus lebih dipertimbangkan perspektif berupa penggunaan komoditas dibandingkan ketersediaan komoditas tersebut (Todaro dan Smith, 2011). Dengan kata lain bahwa komoditas yang ada harus mampu memberikan nilai tambah melalui pengembangan-pengembangannya. Kondisi yang disampaikan oleh Todaro dan Smith (2011) tersebut kemudian diperkuat kembali oleh Sen (1999) yakni keberfungsian (functioning) atau apa yang dapat dilakukan masyarakat terhadap komoditas yang dimiliki dengan karakteristik

tertentu serta mampu dikendalikan. Pengendalian ini oleh Sen (1999) diwujudkan dalam bentuk kebebasan memilih atau kendali atas kehidupan pribadi yang menjadi aspek penting dalam konteks kesejahteraan. Konsep semacam ini mencerminkan adanya daya untuk menjadikan masyarakat bernilai dan memiliki kuasa atas apa yang dimilikinya. Mulai dari mencukupi kebutuhan dasar yang bersifat elementer hingga kebutuhan yang lebih kompleks semacam kemampuan diri dalam beraktualisasi dan mengambil peran dalam kehidupan sosial masyarakat.

Konsep kapabilitas (capability) yang diungkapkan oleh Sen (1999) dalam Todaro dan Smith (2011) mengartikan bahwa kapabilitas (capability) merupakan kebebasan yang dimiliki seseorang dalam kaitannya dengan keberfungsian (functioning) yang menggantungkan pada ciri pribadi. Dengan kata lain, terdapat satu proses perubahan karakteristik pribadi menjadi keberfungsian (functioning) atau peran seseorang dalam masyarakat. Konsep atau pandangan Sen (1999) tersebut semakin memperkuat alasan bahwa pembangunan membutuhkan penguatan dalam hal akses dasar pendidikan dan kesehatan untuk mengembangkan SDM masyarakat. Di samping itu Sen (1999) juga menyampaikan adanya kebutuhan pola pengembangan masyarakat dengan skema-skema yang inklusif dan memberdayakan seperti peningkatan akses pendidikan, kesehatan, kemampuan ekonomi, dan lain-lain. Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Easterly dalam Rodrick (2003) bahwa banyak negara dengan pendapatan tinggi namun tidak mampu mengembangkan potensi yang dimiliki karena keterbatasan akses dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pola kendali sosial masyarakat yang tidak inklusif. Easterly dalam Rodrick (2003) menyebut hal tersebut sebagai negara yang “tumbuh tetapi tidak berkembang”.

### **II.B. Pendekatan Praktis: Konsep Collaborative Governance**

Secara umum, diungkapkan oleh Forrer et al (2014) bahwa terdapat 3 (tiga) cakupan rasionalisasi pendekatan dalam konsep kolaborasi pemerintahan yakni pendekatan secara pragmatis, ekonomi, dan strategi. Dalam konteks pendekatan pragmatis, Forrer et al (2014) mengungkapkan bahwa alasan

diperlukannya kolaborasi adalah menuntaskan permasalahan atau isu penyediaan layanan yang tidak mampu ditangani oleh satu sektor. Ketidakmampuan ini seperti aspek-aspek yang seringkali menjadi hambatan di sektor publik dalam menjalankan program. Beberapa hambatan ini seperti adanya keterbatasan anggaran, kemauan politik (*political will*) dari pelaksana kebijakan, keberadaan sumber daya, permasalahan di sosial masyarakat, atau faktor lainnya yang ada di luar kendali satu sektor. Kettl (2006) kemudian menjelaskan bahwa berdasar pada keterbatasan dan kompleksitas berbagai aspek inilah maka sangat dibutuhkan kesepakatan antar stakeholder dan administrator publik untuk saling menawarkan pendekatan baru dalam menyelesaikan problem sosial yang terjadi. Hal tersebut juga membuka peluang kemungkinan adanya kolaborasi bagi sektor privat (*swasta*) dan pemerintahan di berbagai tingkatan. Forrer et al (2014) kemudian menyatakan bahwa sangat rasional jika upaya berkolaborasi dilakukan untuk menuntaskan permasalahan sosial yang terjadi.

Pada pendekatan kedua yakni pendekatan ekonomi, Forrer et al (2014) menjelaskan bahwa kategori ekonomi sangat erat perbandingan hubungannya antara kolaborasi dengan dorongan untuk meningkatkan keunggulan komparatif antar sektor atau tingkatan pemerintahan. Lebih lanjut lagi Forrer et al (2014) menjelaskan bahwa beberapa sektor lain mungkin memiliki keunggulan tertentu seperti kemampuan (*skills*), pemetaan seputar pasar, kapabilitas, atau jejaring yang dibutuhkan. Di sisi lainnya, sektor tertentu memiliki keunggulan yang dibutuhkan sektor lainnya seperti kepemilikan kewenangan misalnya. Tentunya masing-masing sektor masih terdapat pada satu lingkup pembangunan. Adanya kondisi semacam ini menjadikan masing-masing sektor berupaya untuk saling menutup kelemahan atau kekurangan (*sharing problem*) melalui pembagian peran (*sharing benefit*) selama berjalannya program pembangunan, dan ketika berhasil maka keuntungan akan terbagi dengan sendirinya (*sharing benefit*). Berdasar pada alasan inilah kemudian diupayakan bentuk kolaborasi antar pemerintahan, sektor privat, serta lembaga lainnya baik pada satu atau multi tingkatan.

Konteks terakhir yang disampaikan Forrer et al (2014) adalah pendekatan strategis. Pendekatan ini berporos pada aspek bagaimana supaya pembangunan mampu terlaksana secara tepat, cepat, dan cermat. Di samping itu, disampaikan oleh Forrer et al (2014) bahwa yang menjadi titik tekan dari pendekatan ini adalah bagaimana agar kolaborasi sebagai pendekatan strategi mampu memberikan output (keluaran) pembangunan secara berkelanjutan serta memiliki keberhasilan jangka panjang bagi sasaran program. Selain itu dalam kaitannya dengan skema kolaborasi sendiri juga, pendekatan strategis berupaya menguji serta membuka kemungkinan adanya isu baru yang didapatkan selama upaya kolaborasi dalam pengembangan berlangsung.

## **METODE**

Metode Penelitian menjelaskan tentang bagaimana menyelesaikan masalah, termasuk metode analitis. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian dijelaskan pada bagian ini.

Dalam memformulasikan hasil kajian, maka diperlukan serangkaian metodologi, baik dalam proses pengumpulan data dan informasi yang kemudian diolah melalui teknik analisis hasil penelitian. Untuk sumber data dan informasi, dilakukan pada triangulasi antara masyarakat lokal, pemerintah daerah, serta pandangan para pakar atau ahli. Secara umum, metode yang digunakan adalah kualitatif yang menjadikan peneliti berperan sebagai *participant observer* (partisipan pengamat) yang melaksanakan proses pencatatan, perekaman, serta pengamatan (Ahmad, 2015).

Tabel 2. Rumusan Perencanaan dalam Pembangunan Pesisir Kabupaten Tangerang

Deskripsi Perspektif (1)	Analisis SWOT (2)	Sintesis Tujuan dan Strategi (3)
Masyarakat	Mencari potensi dan kekurangan di Pesisir Kabupaten Tangerang (objek penelitian)	Penetapan tujuan, sasaran, dan prioritas
Pemerintah	Mengidentifikasi peluang pengembangan dan ancaman di Pesisir Kabupaten Tangerang (objek penelitian)	
Pakar/Ahli		Penyusunan Strategi Pengembangan

Sumber. Keban (diolah penulis, 1999)

Data seputar kondisi lapangan (masyarakat, pemerintah, dan pakar/ahli) didapatkan melalui metode PRA atau participation rural appraisal (wawancara, interview, studi okumen kajian, observasi, dan focus group discussion). World Bank dalam Mustanir et al (2018) menjelaskan bahwa PRA merupakan proses dalam analisis, perencanaan, dan tindakan dalam bentuk pendekatan partisipatif serta metode yang menekankan pada konteks lokal. Teknik ini berupaya mendapatkan perspektif masyarakat lokal dari berbagai tokoh masyarakat (local strong man) dan pemerintah lokal (street level bureucracy) yang mewakili perspektif kondisi lokal. Untuk persepsi pemerintah, dilakukan melalui analisa kajian dan evaluasi dokumen perencanaan daerah. Untuk perspektif ahli atau pakar diperoleh melalui studi observasi lapangan menyangkut potensi alam (SDA) dan potensi lokal lainnya yang kemudian dikaitkan dengan potensi kawasan lainnya.

Dari seluruh temuan sebelumnya, maka kemudian dilakukan analisa SWOT baik lingkungan internal maupun eksternal. Di lingkungan internal, akan dianalisis beberapa hal yakni: a).sumber daya pesisir; b).strategi pembangunan yang telah dilakukan di kawasan pesisir, dan; c).kinerja pembangunan kawasan pesisir. Penilaian dilakukan dengan menggolongkan berbagai aspek-aspek apakah kemudian mendorong atau justru menghambat

pembangunan. Sementara itu di lingkungan eksternal dilakukan kajian seputar kecenderungan dari luar yang berdampak pada pembangunan kawasan pesisir di Kabupaten Tangerang yakni: a. politik; b.ekonomi; c.sosial, dan; d.teknologi. Dari lingkungan eksternal, kemudian diidentifikasi berbagai peluang (opportunities) yang perlu dikembangkan dan ancaman (threats) yang perlu dihindari dalam pembangunan kawasan pesisir di Kabupaten Tangerang di masa selanjutnya.

Pasca dilakukan analisa SWOT, maka kemudian disusun sintesis antar tujuan dan prioritas serta strategi pengembangan sektor unggulan. Selama menyusun strategi pengembangan sektor unggulan, terdapat beberapa catatan yang harus dipahami yakni:

- Sektor-sektor harus mendapatkan legitimasi kuat baik oleh masyarakat lokal yang diukung dokumen kebijakan sebelumnya (diperoleh melalui konsensus pembangunan);
- Sektor-sektor tersebut mampu mengisi peluang ekonomi baik di skala lokal maupun di luar kawasan;
- Sektor-sektor tersebut mampu memberikan harmonisasi (keterpaduan) pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peluang kerja, pemerataan, stabilitas, kelestarian alam, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- Sektor-sektor tersebut didukung oleh potensi fisik seperti kesesuaian lahan dan zona ekologi;
- Sektor-sektor tersebut didukung oleh kondisi demografi penduduk lokal, teknologi, dan kelembagaan masyarakat.

## HASIL DAN DISKUSI

### Penanganan Permukiman Kumuh Pesisir Kabupaten Tangerang

Merumahkan masyarakat kumuh di Pesisir Kabupaten Tangerang adalah bagaimana merencanakan program pembenahan perumahan dan permukiman masyarakat lokal menjadi lebih humanis. Upaya ini tidak semata-mata dengan menggusur masyarakat ilegal, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta adanya

rumah tidak layak huni (RTLH) yang banyak terdapat di kawasan pesisir. Namun lebih dari itu bahwa merumahkan masyarakat yakni meningkatkan kualitas permukiman, mamampukan akses rumah layak huni, serta berpikir tentang aspek keterjangkauan perumahan dan inklusivitas proses pembangunan.

Bertolak dari paradigma governance yang diusung, upaya membangun lingkungan permukiman di Pesisir Kabupaten Tangerang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai stakeholder serta bukan menjadikan pemerintah sebagai aktor tunggal pembangunan. Program Sejuta Rumah yang menjadikan Kabupaten Tangerang sebagai pilot project (proyek percontohan) berskala nasional misalnya. Dalam hal ini, terjadi jalinan kerjasama atau inter connected governance antara pemerintah dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Jalinan kerjasama tersebut menjadikan masing-masing pihak memiliki peran yang tidak hanya memonopoli sektor perumahan terjangkau, namun lebih dari itu bahwa terjadi upaya menjangkau akses kepemilikan perumahan dan permukiman bagi masyarakat miskin. Sinergitas pembangunan perumahan di Kabupaten Tangerang sendiri yakni menjadikan masing-masing pihak memiliki peran berupa pemerintah pusat memberikan kemudahan dalam aspek regulasi bagi pengembang perumahan, pemerintah daerah berperan memfasilitasi di sektor lahan, serta BTN sebagai lembaga untuk akses pembiayaan. Dalam konteks penelitian, program ini juga menyasar masyarakat nelayan khususnya di Kecamatan Pakuhaji dengan prioritas mengentaskan kemiskinan dengan syarat memiliki penghasilan kurang dari Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Selain program yang berskala nasional, dalam lingkup lokal juga dilakukan upaya pembenahan permukiman oleh pemerintah daerah yakni salah satunya gerakan bersama rakyat atasi kawasan padat kumuh dan miskin (Gebrak Pakumis) yang menjadikan target masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah sebagai target sasaran. Dalam program ini pihak yang berpartisipasi yakni BPKAD, Dinas Cipta Karya, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, serta Badan Pertanahan Nasional Pemerintah Kabupaten Tangerang. Sebagai keberlanjutan

Untuk pelaksanaan Gebrak Pakumis, hal ini didasarkan pada adanya upaya menangani kawasan kumuh di Kabupaten Tangerang. Kawasan kumuh ini diartikan sebagai permukiman dan rumah tidak layak huni, prasarana sarana dan utilitas (PSU) yang buruk dan di bawah standar kualitas, serta aspek lainnya berkenaan dengan lingkungan yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Untuk seluruh wilayah penelitian, tentunya permasalahan kumuh telah dinyatakan dalam SK Bupati Tangerang No:050/Kep.47-Huk/2015 dan telah sesuai dengan apa yang menjadi sasaran dari Program Gebrak Pakumis. Sebagai dukungan, maka disusun program lain berupa Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan kegiatan berupa penyusunan database, pelatihan pengelola program stimulan, dan penyaluran dana stimulan. Untuk masyarakat di wilayah sasaran sendiri juga mendapatkan peran berupa pemberdaya sekaligus pelaksana. Untuk pelaksanaan dari Program Gebrak Pakumis sendiri, masyarakat di wilayah penelitian mendapatkan biaya perbaikan rumah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kepala keluarga (KK) dengan pelaksanaan pembangunan dilakukan secara swadaya.

#### **Isu dan Potensi Strategis Masyarakat Pesisir di Kabupaten Tangerang (SWOT)**

Bagi masyarakat di Pesisir Kabupaten Tangerang, SDA baik di wilayah perairan atau kelautan serta pertanian dan agro merupakan potensi utama yang masih ada pada saat ini. Keberagaman potensi tersebut tentunya memberikan manfaat (benefit) terutama dalam ketahanan sosial berupa kemampuan penyediaan penghidupan (livelihoods) serta ketahanan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Bagi pemerintah, baik lokal maupun daerah, potensi tersebut juga memberikan banyak manfaat. Namun sayangnya, banyak aspek yang menghambat potensi SDA mulai dari kecenderungan berupa masalah lingkungan, ekonomi, hingga sosial budaya sendiri.

Aspek lingkungan seringkali menjadi masalah yang hampir tidak terselesaikan bagi



masyarakat pesisir di Kabupaten Tangerang. Permasalahan lingkungan tersebut mulai dari terjadi oleh faktor alam hingga faktor yang disebabkan oleh penduduk dan telah terjadi selama bertahun-tahun. Bencana banjir rob hampir melanda permukiman penduduk lokal yang kemudian menyebabkan banjir. Fenomena lainnya yang semakin memperburuk kondisi permukiman adalah kebiasaan masyarakat pesisir dalam menjaga kebersihan lingkungan seperti membuang sampah sembarangan, membiarkan hewan ternak berkeliaran, buang hajat sembarangan, hingga membuang limbah hasil laut (kulit kerang) sembarangan. Beberapa titik lokasi seperti di permukiman penduduk, saluran air, pasar dan TPI terkena dampak seperti penyumbatan serta polusi udara. Bagi penduduk lokal, hal ini telah menjadi kebiasaan sementara penanganan sangat terbatas mengingat resistensi kebiasaan buruk masyarakat jauh lebih besar dibandingkan menjaga budaya hidup bersih. Kondisi lain yang semakin memperburuk aspek lingkungan adalah minimnya fasilitas tempat pembuangan sampah (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) yang kemudian menjadikan polusi lingkungan semakin tinggi.

Secara umum, pemetaan untuk potensi pengembangan dan hambatan di kawasan penelitian yakni berupa adanya potensi, masalah, peluang, serta tantangan atau SWOT yang menggambarkan kondisi saat ini (existing). Berkenaan dengan kondisi lokal, terdapat potensi yang dimiliki antara lain:

1. Wilayah penelitian memiliki kondisi geografi kawasan pesisir dengan kekayaan SDA;
2. Memiliki trigger (pemicu) dalam peningkatan kualitas kesejahteraan dan SDM;
3. Persentase tingkat usia produktif yang tinggi di setiap wilayah penelitian;
4. Aktivitas sektor pertanian sebagai penunjang perekonomian dan agrowisata lokal;
5. Sebagai akses penyeberangan di kepulauan;
6. Memiliki kesenian lokal seperti lenong, tanjidor, dan kesenian lain yang masih dipertahankan;

7. Apresiasi dan keterbukaan masyarakat lokal dalam upaya pengembangan kawasan pesisir.

Dari potensi yang ada, terdapat beberapa hambatan yang terjadi, khususnya pada kurangnya berbagai sumber daya dan fasilitas. Beberapa hambatan yang terjadi dalam pengembangan kawasan pesisir antara lain:

1. Dominasi angka pengangguran dan kemiskinan di Pesisir Kabupaten Tangerang;
2. Berdasarkan prosentase pendidikan formal, SDM di kawasan penelitian cenderung rendah;
3. Kurangnya fasilitas kesehatan, dan;
4. Kurangnya pemberdayaan lokal baik dari segi SDM, program, atau ukungan infrastruktur.

Pada dasarnya, paradoks yang terjadi di kawasan penelitian didapatkan dari perbandingan antara potensi dengan hambatan kawasan. Tingginya potensi yang dimiliki namun terdapat hambatan dalam konteks yang sama menjadikan kondisi pesisir dan masyarakatnya cenderung paradoks. Namun meskipun begitu, upaya perumusan strategi penanganan mampu menghasilkan peluang keberhasilan dan ancaman jika tidak dilakukan usaha-usaha merumuskan strategi pembangunan masyarakat dan kawasan. Peluang tersebut diantaranya:

1. Kekuatan lokal utama berupa modal sosial masyarakat sebagai tonggak utama dalam mempertahankan nilai sosial budaya masyarakat lokal pesisir, dan;
2. Adanya peningkatan sosial ekonomi dari nilai-nilai kearifan lokal yang masih dipertahankan.

Sementara itu, ancaman yang mungkin terjadi jika dikaitkan dengan kondisi saat ini antara lain:

1. Transisi budaya kenelayanan menuju perdagangan, jasa, dan industri;
2. Distorsi sosial dan bencana alam, serta;
3. Konflik lokal yang terjadi utamanya pada pengelolaan SDA dan wisata di kawasan pesisir (Bappeda Kabupaten Tangerang, 2019).

Adanya berbagai permasalahan dan hambatan yang terjadi tentunya membutuhkan adanya penanganan, baik untuk melakukan revitalisasi kawasan permukiman (beserta



penyediaan PSU dan layanan dasar) maupun melakukan pengembangan potensi pesisir berbasis komunitas lokal beserta penguatan nilai-nilai kegotong-royongan masyarakat dalam modal sosial. Selama observasi berlangsung, terdapat temuan berupa beberapa indikator kerentanan masyarakat pesisir baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi seperti kemacetan di titik-titik kepadatan arus lalu lintas di kawasan industri, penumpukan sampah/limbah di kawasan perairan pantai akibat ketiadaan tempat pembuangan sampah (TPS), akses jalan yang kurang memadai, minimnya penyediaan air bersih, luapan rob, rendahnya tingkat SDM masyarakat, usia produktif yang lebih berminat di sektor perdagangan dan jasa, serta pengelolaan potensi lokal yang belum optimal. Disamping itu, permasalahan lain yang muncul seperti konflik masyarakat utamanya dalam pengelolaan SDA kelautan dan wisata. Beberapa indikator kerentanan tersebut menjadikan dasar diperlukan adanya upaya penataan dan pengembangan. Terlebih di setiap desa memiliki potensi lokal seperti;

1. Desa Dadap, memiliki potensi pesisir berupa kerang hijau dan perikanan serta kampung kuliner laut;
2. Desa Tanjung Pasir, memiliki potensi wisata pesisir, hutan mangrove, pertanian, perikanan laut dan budidaya, sebagai akses jalur penyeberangan ke kepulauan wisata milik Kota Jakarta (Pulau Seribu, Pulau Rambut, dsb);
3. Desa Surya Bahari, memiliki potensi perikanan laut dan direncanakan sebagai kawasan pelabuhan bongkar muat logistik jalur laut, dan;
4. Desa Kohod, memiliki potensi pertanian, agro (kelapa), serta hasil laut (kepiting rajungan)

Dari keseluruhan wilayah kajian, semua memiliki potensi sama yakni adanya jalur tol yang melalui wilayah desa. Hal tersebut menjadikan setiap desa memiliki peluang perekonomian yang bertumbuh. Selain itu terdapat kesamaan berkaitan dengan permasalahan di setiap desa khususnya dalam bentuk belum optimalnya kemampuan SDM lokal dalam mengelola potensi alam. Di samping itu, intervensi yang dilakukan dalam mengatasi

permasalahan pesisir masih minim di tengah menurunnya modal sosial berupa sikap gotong-royong, pengembangan jaringan, serta penguatan nilai-nilai budaya masyarakat dan mindset masyarakat lokal di usia produktif. Kondisi tersebut tentu akan memberikan dampak buruk baik bagi masyarakat lokal maupun luar ketika tidak dilakukan pembenahan, penataan, serta pengembangan.

Dalam kepranataan yang ada, 4 (empat) kawasan pesisir di Kabupaten Tangerang kesamaan yakni adanya potensi kawasan pesisir dan merupakan kawasan dengan potensi ekonomi strategis. Pada dokumen kebijakan yang telah disusun yakni RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2013-2018, hal tersebut diintegrasikan dalam satu program pembangunan yaitu "Gerbang Mapan" atau gerakan pembangunan masyarakat pantai di Kabupaten Tangerang. Program Gerbang Mapan tersebut dimaksudkan sebagai upaya percepatan pertumbuhan infrastruktur masyarakat pantai yang terdapat di wilayah utara Kabupaten Tangerang yaitu Kecamatan Kosambi (Desa Dadap) yang hendak dikembangkan untuk kuliner wisata bahari, Kecamatan Teluk Naga (Desa Tanjung Pasir) dengan potensi Pantai Tanjung Pasir dan wisata mangrove, serta Kecamatan Pakuhaji (Desa Kohod dan Surya Bahari/Cituis) untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, perdagangan, dan pesisirnya (dibangun dermaga pelabuhan bongkar muat logistik serta TPI).

Peluang pengembangan pesisir yang terintegrasi dalam Program Gerbang Mapan juga sekaligus memiliki tujuan untuk bersinergi dengan pembangunan reklamasi pantai utara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Tangerang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dominasi akan adanya keterbatasan mulai dari permukiman dan PSU hingga SDM masyarakat di Pesisir Kabupaten Tangerang menjadi alasan utama program tersebut dilaksanakan. Di samping pengembangan permukiman dan infrastruktur PSU, pengembangan SDM yang berorientasi pada pengelolaan potensi lokal dan kesejahteraan juga diupayakan guna mengatasi adanya kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat pesisir. Kerentanan tersebut dialami khususnya pada saat berlangsungnya pengelolaan SDA yang dimiliki setiap desa pesisir. Untuk konteks

perikanan dan hasil laut, sejauh ini masih memberikan pemasukan yang baik. Namun kerentanan ini terjadi ketika hasil perikanan dijual hanya secara mentah dan belum memberikan nilai tambah karena banyaknya pekerja dengan penghasilan yang amat sedikit. Salah satu contoh yang terjadi adalah yang ada di Desa Kohod yakni hasil laut berupa kepiting rajungan yang kemudian diambil dagingnya saja dan dihargai Rp.100.000,00-150.000,00 per kilonya untuk diolah kembali oleh pengepul. Sementara keuntungan lainnya didapatkan masyarakat hanya dari cangkang yang kemudian digiling halus untuk pakan ternak.

Di satu sisi, masyarakat lokal memang mendapatkan pemasukan dari hasil laut yakni dari penjualan kepiting rajungan dan tepung cangkang kepiting rajungan. Namun di sisi lain, masyarakat lokal yang mampu menghasilkan kepiting rajungan belum mampu mengembangkan potensi SDA menjadi produk yang bernilai tambah yang notabene dapat memberikan nilai lebih bagi baik bagi masyarakat lokal selaku produsen maupun masyarakat luar selaku konsumen.

Potensi lainnya berkenaan dengan kawasan pesisir yang hendak dikembangkan dalam rencana kawasan wisata terpadu yakni kawasan wisata bahari dan kuliner pesisir yang terdapat di Desa Tanjung Pasir dan Desa Dadap. Kedua desa memiliki trigger berupa pantai wisata, hutan mangrove, serta kompleks rumah makan seafood tradisional. Selain pariwisata dan hasil perikanan laut (dengan jumlah produksi 75.088 kg pada tahun 2015, data TPI Tanjung Pasir), panorama pantai, wisata budaya bahari, penyeberangan menuju pulau wisata milik Kota DKI Jakarta, dan kuliner pesisir (ikan laut, cumi-cumi, udang, serta kerang hijau) masih menjadi daya tarik yang mampu menarik minat wisatawan luar daerah untuk berkunjung di Pesisir Kabupaten Tangerang. Namun sayangnya, kemampuan untuk upaya pengembangan masih minim akibat adanya keterbatasan SDM, permodalan, modal sosial masyarakat lokal, serta dukungan lainnya. Di sisi lain, pariwisata yang ada sangat berpeluang menjadikan kawasan desa sebagai tujuan wisata ketika nantinya terdapat proses realisasi berkenaan dengan integrasi kawasan wisata menjadi satu paket destinasi masyarakat.

Berkenaan dengan pengembangan kawasan wisata pesisir, kekurangan dari pariwisata adalah masih adanya peluang pengembangan pariwisata di beberapa titik namun belum ada upaya pengembangan lebih lanjut. Cooper et al (1997) dalam Priatmoko (2017) menjelaskan bahwa konsep pengembangan pariwisata seyogyanya mempertimbangkan aspek attraction (atraksi), amenity (amenitas, akomodasi), accesibility (aksesibilitas), dan ancillary (elemen tambahan) atau 4A. seperti keberadaan menjadi celah kelemahan adalah belum optimalnya amenitas, akomodasi, dan aksesibilitas. Amenitas sendiri merupakan seperti sarana ketersediaan fasilitas ibadah, fasilitas MCK, toko buah tangan, serta kelengkapan kebutuhan wisatawan sebagai pendukung wisata baik di Desa Dadap maupun Desa Tanjung Pasir. Untuk akomodasi atau kelengkapan layanan pendukung kawasan seperti adanya pemandu wisata, jasa wisata, kelompok sadar wisata (pokdarwis), biro perjalanan wisata, dan stakeholder lainnya yang memberikan layanan tambahan wisata di Desa Tanjung Pasir dan Desa Dadap juga masih perlu dikembangkan. Di samping itu, yang perlu dikembangkan juga adalah aksesibilitas menuju kawasan wisata berupa jalur dan petunjuk arah. Selain perbaikan jalur berupa jalan raya, pemberian papan-papan petunjuk arah juga perlu diberikan agar wisatawan yang hendak menuju destinasi wisata mengetahui arah yang dituju mengingat masih minim dan terbatasnya informasi mengenai destinasi wisata setempat.

Masih berhubungan dengan aspek sosial dan ekonomi, program yang ada dilaksanakan seiring dengan urgensi pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dengan kegiatan berupa penyusunan grand design, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penyediaan infrastruktur pendukung. Secara khusus hal ini dapat diterapkan pada Desa Dadap dan Desa Surya Bahari dimana keduanya merupakan kawasan dengan morfologi industri. Desa Dadap merupakan jalur bongkar muat peti kemas dan memiliki intensitas kepadatan kendaraan yang cukup tinggi mengingat Desa Dadap merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan Kota Jakarta. Selain itu, di Desa Surya Bahari sendiri direncanakan hendak dibangun pelabuhan

bongkar muat logistik yang terkoneksi dengan Kota DKI Jakarta. Dari kedua aspek, maka keduanya memiliki peluang pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat lokal dalam kaitannya dengan pembangunan kota. Untuk itu diperlukan adanya pembangunan secara komprehensif berkenaan dengan infrastruktur yang dimiliki.

Tabel 3. Kawasan Lahan Budidaya/Peruntukan di Kabupaten Tangerang

No	Kawasan	Peruntukan Pengembangan
a	Kampung Baru Dadap, Kecamatan Kosambi	a. Pergudangan dan industri terbatas; b. Wisata bahari (Pantai Dadap); c. Kawasan permukiman perkotaan, dan; d. Kawasan reklamasi
b	Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga	a. Pertanian; b. Peternakan; c. Wisata bahari (Pantai Tanjung Pasir); d. Kawasan permukiman perkotaan, dan; e. Kawasan reklamasi
c	Desa Surya Bahari dan Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji	a. Pertanian; b. Industri sedang; c. Permukiman pedesaan, dan; d. Kawasan reklamasi.

Sumber. RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018

Secara keseluruhan, maka diharapkan pada akhir periode RPJMD terdapat perubahan infrastruktur dan perekonomian signifikan pada kawasan perencanaan yang masuk dalam 23 desa pesisir pantai melalui program dan pendanaan secara spesifik yakni senilai 1 milyar per desa. Adapun pihak yang terkait dalam program ini antara lain BAPPEDA, Dinas Tata Ruang, Dinas Cipta Karya, Dinas KUKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BKP3M, Dinas Bina Marga, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kelompok masyarakat.

Dalam aspek permukiman kumuh, juga dilaksanakan kajian yang berawal dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dan 2018-2022. Hasilnya, penanganan permukiman kumuh merupakan salah satu agenda/urgensi penting. Dalam RPJMD Provinsi Banten ke tiga

yaitu tahun 2012-2017 fokus pembangunan adalah pengembangan kerjasama manajemen pengelolaan sampah dan limbah regional, meningkatnya ketersediaan rumah yang layak huni dan terjangkau, peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana air bersih, pengembangan kerjasama pembangunan dan pengelolaan sistem transportasi penghubung antara Pulau Jawa-Sumatera, peningkatan pemanfaatan energi alternatif, penataan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika secara terpadu. Sementara itu, RPJMD tahun ke 4 berfokus pada fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di perdesaan, ketersediaan rumah yang layak huni, terjangkau, dan responsif bencana, dan fasilitasi usaha pengembangan perumahan.

### Identifikasi Sektor Strategis dan Rencana Pengembangan

Identifikasi pengembangan kawasan cepat tumbuh oleh Kabupaten Tangerang diarahkan pada potensi kawasan pesisir secara terpadu dalam satu rencana program. Selain itu, aspek yang menjadi orientasi adalah konsep pembangunan secara komprehensif dalam bentuk tridaya berupa penguatan daya sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pelaksanaan pembangunan bukan hanya berorientasi pada pembangunan kesejahteraan masyarakat dari aspek pendapatan ekonominya saja, tetapi juga meningkatkan kualitas aspek sosial dan kualitas lingkungan.

Sebagai arah awal pembangunan kawasan pesisir, maka optimalisasi penataan ruang dimulai dari permukiman dan infrastruktur serta dengan merevitalisasi fungsi ruang di kawasan perencanaan. Kawasan perencanaan diarahkan pada upaya-upaya pengembangan potensi pesisir, tetapi secara khusus masing-masing memiliki potensi yang berbeda baik dari kajian kondisi existing maupun dokumen perencanaan. Untuk Desa Dadap dan Tanjung Pasir, keduanya diarahkan pada potensi bahari dan pariwisata berbasis pesisir. Corak utama dari potensi tersebut adalah memiliki trigger berupa atraksi wisata berupa alam pantai dan pesisir. Di samping itu, pengembangan juga dilakukan pada usaha mikro pendukung potensi kedua desa seperti kuliner laut (seafood), hasil laut, serta

olahan laut. Wisata lain selain alam pantai dan kuliner yakni terdapat di Desa Tanjung Pasir berupa hutan mangrove. Sebagai langkah pengembangan, maka Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan revitalisasi mulai dari akses jalan, perbaikan sarana prasarana, serta peningkatan kapasitas kemampuan warga untuk menyediakan produk olahan hasil laut. Di Desa Surya Bahari, produk hasil laut sudah ditawarkan baik dalam bentuk ikan segar, olahan kering, serta kuliner. Namun berbeda dengan Desa Tanjung Pasir, di Desa Surya Bahari belum dilakukan proses perencanaan dan pengembangan berkenaan dengan wisata dan potensi yang dimiliki. Untuk Desa Kohod dan Desa Surya Bahari, keduanya diarahkan pada pengembangan potensi pertanian, budidaya, dan holtikultura seperti padi, kelapa, rajungan, dan ikan tambak. Secara keseluruhan, masing-masing wilayah kajian menunjukkan adanya potensi khusus dan saling melengkapi satu sama lain dalam pengembangan kawasan pesisir.



Gambar. Fokus Strategi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Masyarakat Pesisir Kabupaten Tangerang

Sumber. Hasil olah Penulis (2019)

Untuk mendukung adanya pembangunan yang komprehensif, maka rumusan strategi dilakukan dengan menitikberatkan aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Masing-masing memiliki konteks khusus dikaitkan dengan kondisi existing dan kebutuhan pengembangan pesisir di Kabupaten Tangerang.

1. Aspek sosial, yakni dengan adanya kondisi keterbatasan SDM, maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas berupa keahlian dan SDM masyarakat lokal. Peningkatan tersebut baik dari segi pendidikan formal maupun informal. Dari segi tatanan

sosial, adanya tingkat SDM yang berkualitas akan mendorong adanya tatanan sosial yang lebih baik selama dilakukan pengelolaan potensi kawasan. Di samping itu, peluang ketika potensi kawasan dikelola oleh masyarakat lokal pun akan banyak berdampak positif seperti meningkatnya kekuatan modal sosial masyarakat lokal berupa pemahaman akan karakter/budaya lokal, kepekaan, jiwa gotong royong, dan tanggungjawab moral pada kelestarian lingkungan;

2. Aspek ekonomi, yakni berupa adanya pengembangan ,dan pembangunan akan turut memberikan peluang baru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Pengembangan tersebut baik dari aspek kelautan, pertanian, kawasan wisata, maupun perdagangan dan jasa. Selain itu, menciptakan peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal seperti pengolahan produk mentah menjadi proding setengah jadi atau produk jadi tentunya akan meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan;
3. Aspek lingkungan, yakni dilakukan upaya penataan ruang yang secara khusus terintegrasi dalam satu kawasan pesisir Laut Jawa. Selain itu, dilakukan juga proses penataan yang juga didukung oleh penyediaan infrastruktur PSU baik bagi masyarakat lokal maupun masyarakat luar.

Secara keseluruhan, upaya untuk mewujudkan kawasan cepat tumbuh di 4 (empat) titik perencanaan ini tidak lepas dari peran para stakeholders terkait dari sektor publik seperti: Pemerintah, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Tangerang, pemerintah tingkat lokal kecamatan dan kelurahan, BUMN/BUMD. Selain itu, diperlukan pula kehadiran sektor privat dan masyarakat setempat guna mendukung peran sektor publik berkenaan dengan pengelolaan kawasan potensial secara berkelanjutan

Dalam membangun kawasan perencanaan yang ada, secara keseluruhan terintegrasi dalam satu rangkaian program besar yakni gerakan pembangunan masyarakat pantai atau dikenal dengan "Gerbang Mapan" yang telah tercantum

dalam RPJMD Kabupaten Tangerang. Program Gerbang Mapan dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan infrastruktur dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat pantai yang terdapat di wilayah utara Kabupaten Tangerang. Selain itu, upaya yang terintegrasi dalam "Gerbang Mapan" sekaligus memiliki tujuan agar siap menyongsong pembangunan kawasan reklamasi pantai utara yang direncanakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kondisi wilayah pantai utara (khususnya pada wilayah perencanaan) yang didominasi prasarana, sarana dan utilitas yang belum memadai serta dihuni oleh masyarakat miskin serta berpenghasilan rendah juga menjadi alasan kuat mengapa harus diimplementasikan program tersebut. Selain pengembangan infrastruktur juga turut didukung dengan pengembangan ekonomi masyarakat secara merata. Berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi, program yang ada seiring dengan adanya urgensi pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Untuk rencana investasi dan pola kemitraan, pembangunan kawasan perencanaan di 4 (empat) titik kawasan perencanaan tentunya bukan hanya peran dari pemerintah lokal. Namun lebih dari itu, proses pembangunan yang berlangsung melibatkan banyak aktor dan stakeholder yang berperan untuk menyukseskan dan berusaha mencapai tujuan bersama. Peran tersebut merupakan satu bentuk kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, pihak pertama yang terkait dalam program ini antara lain adalah pemerintah pusat dan provinsi. Untuk skala Kabupaten Tangerang, BAPPEDA, Dinas Tata Ruang, Dinas Cipta Karya, Dinas KUKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BKP3M, Dinas Bina Marga, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kelompok masyarakat. Di luar keberadaan pemerintah, investasi swasta, badan usaha, dan masyarakat (non-pemerintah) sangat diperlukan dalam kaitannya dengan dukungan pembiayaan. Upaya tersebut dilaksanakan untuk membangun dan meningkatkan kinerja pembangunan serta mempercepat terwujudnya pembangunan kawasan cepat tumbuh dalam

satu rangkaian program peningkatan kualitas sosial ekonomi masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Permukiman kumuh seakan telah menjadi satu kewajiban bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Tangerang. Padahal tanpa disadari, kondisi tersebut memicu dampak ancaman buruk dalam aspek sosial, ekonomi, serta kesehatan/lingkungan. Kemiskinan, kesenjangan, dan penyakit sosial banyak terjadi pada masyarakat di kawasan kumuh pesisir. Kemiskinan yang terjadi bahan telah menjadi semacam lingkaran setan (vicious circle) bagi penduduk lokal dan berlangsung turun temurun di tengah pesatnya pembangunan dan kemajuan di ibukota. Ditambah lagi dengan adanya ancaman berupa bencana alam pesisir yang merusak lingkungan permukiman. Tentunya hal ini membutuhkan upaya khusus untuk menyelesaikan permasalahan pesisir.

Dalam membenahi lingkungan dan permukiman masyarakat, secara keseluruhan dilakukan melalui skema kerjasama pembangunan permukiman pesisir antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat lokal setempat. Selain itu, kerjasama antar sektor pemerintah di lingkup daerah juga penting untuk dilakukan kerjasama mengingat adanya visi yang sama dalam memperbaiki kondisi daerah. Pembenahan tersebut dilaksanakan melalui berbagai program serta pengembangan pilot project pembangunan permukiman masyarakat pesisir yang melibatkan pemerintahan. Dukungan lainnya dengan melaksanakan program komprehensif dalam penataan lingkungan secara berkelanjutan. Fokus utamanya jelas, mengatasi permasalahan bersama serta saling berbagi peran untuk mengatasi masalah (shared problem) dan berbagi keberhasilan (sharing benefit).

Selain itu, keberadaan baik potensi maupun sumber daya alam (SDA) menjadi modal awal dalam kemajuan pembangunan daerah. Kesempatan yang dimiliki Kabupaten Tangerang untuk menjadikan daerah juga sangat tinggi. Namun adanya berbagai hambatan mulai dari lingkungan kumuh, bencana, SDM, hingga faktor kemampuan pemerintah dalam mengelola permasalahan daerah menjadikan kemajuan sulit tercapai. Dampak ancaman struktural yang

terjadi yakni mulai dari pemerintah gagal merealisasikan visinya yakni menjadikan masyarakat sejahtera, masyarakat tetap berada pada lingkaran kemiskinan dan terbelakang, serta SDA tidak dikelola secara optimal. Untuk itu, pembangunan pun harus dilakukan dengan merata dan optimal, khususnya bagi masyarakat pesisir yang turut memberikan peran dalam kemajuan di Kabupaten Tangerang.

## REFERENSI

- Ahmad, Jamaluddin. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Forrer, Jon J., Kee, James E., Boyer, Eric. (2014). *Governing Cross-Sector Collaboration*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Keban, Yeremias T. (1998). Aplikasi *Strategic Planning* dalam Perencanaan Pembangunan Kabupaten Fakfak Provinsi Irian Jaya. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. II (1): 96-125.
- Kettl, Donald. (2006). Managing Boundaries in American Administration: The Collaboration Imperative. *Public Administration Review*. 66(1): 10-19.
- Mustanir, A., Yasin, A., Irwan, & Rusdi, M. (2018). Potret Irisan Bumi Desa Tonrong Rijang Dalam *Transect* pada Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *Jurnal Moderat*. 4(4): 1-14.
- Priatmoko, Setiawan. (2017). Pengaruh Atraksi, Media Sosial, dan Infrastruktur terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan ke Desa Wisata Pentingsari Yogyakarta. *Jurnal Khasanah Ilmu*. 8(1): 72-82.
- Rodrick, Dani. (2003). *In Search of Prosperity: Analytic Narratives of Economic Growth*. New Jersey: Princetown University Press.
- Sen, Amartya. (1999). *Development as Freedom*. New York: Knopf.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Todaro, Michael P., & Smith, Stephen C. (2011). *Economic Development (11<sup>th</sup> Edition)*. United Kingdom: Pearson Education Limited

## Dokumen Kebijakan:

- Kabupaten Tangerang dalam Angka 2017 (Badan Pusat Statistik)
- Laporan Antara Kajian Sosial Ekonomi Pengembangan Permukiman Kampung Nelayan Kabupaten Tangerang 2018 (Bappeda Kabupaten Tangerang, diakses pada 2019)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018 (Bappeda Kabupaten Tangerang, diakses pada 2019)
- Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Bappeda Kabupaten Tangerang, diakses pada 2019)
- Surat Keputusan Bupati Tangerang No:050/Kep.47-Huk/2015 tentang Penetapan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tangerang (Bappeda Kabupaten Tangerang, diakses pada 2019)